

LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH



2019



**BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SLEMAN**

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55511

Telepon (0274) 868405 Faximile (0274) 868309 Email : bkpp@slemankab.go.id

website ; www.bkpp.slemankab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tahun 2019 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman ini merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya yang harapannya dapat dimanfaatkan untuk :

- (1) Bahan evaluasi kinerja
- (2) Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang
- (3) Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
- (4) Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman tahun 2019 disusun dalam kerangka akuntabilitas Instansi Pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *GOOD GOVERNANCE*, dan dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik serta bagian dari REFORMASI BIROKRASI pemerintah Kabupaten Sleman.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat bermanfaat.

Sleman, Februari 2020
Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sleman

H. PRIYO HANDOYO, S.H.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196630112 199503 1 002



DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Tugas Pokok Fungsi.....	1
B. Gambaran Umum Pelayanan.....	9
C. Sumber Daya Manusia.....	10
D. Keuangan.....	12
E. Sarana dan Prasarana.....	13
Bab II Perencanaan Kinerja.....	14
A. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	14
B. Perjanjian Kinerja.....	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
B. Realisasi Anggaran.....	33
Bab IV Penutup.....	43
Lampiran-Lampiran.....	



BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian daerah.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
- c. Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
- d. Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan pegawai;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Susunan organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
 2. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan; dan



3. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Mutasi terdiri dari:
 1. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;
 2. Subbidang Penempatan Pegawai; dan
 3. Subbidang Kepangkatan Pegawai.
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai terdiri dari:
 1. Subbidang Pembinaan Pegawai;
 2. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 3. Subbidang Data dan Informasi Pegawai.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian Tugas dan Fungsi adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. Pelaksanaan urusan umum;
4. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
5. Pelaksanaan urusan keuangan;
6. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
7. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.



Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- 2) Perumusan kebijakan teknis urusan umum dan urusan kepegawaian;
- 3) Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- 4) Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
- 5) Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- 6) Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- 7) Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

b) Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- 3) Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- 4) Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- 5) Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan,
- 6) Pelaksanaan kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.



b. Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan, melayani dan membina perencanaan pegawai, pengembangan pegawai, pendidikan pegawai, dan pelatihan pegawai.

Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan;
2. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai;
3. Pelaksanaan dan pembinaan perencanaan pegawai;
4. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan pegawai;
5. Penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai;
6. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.

a) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan pegawai dan pengembangan pegawai.

Subbidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan dan Pengembangan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pegawai;
- 3) Penyusunan formasi pegawai;
- 4) Pelaksanaan analisis pengembangan karir pegawai;
- 5) Pelaksanaan uji kompetensi pegawai; dan
- 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan dan Pengembangan.



b) Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program pendidikan dan pelatihan pegawai.

Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis penyusunan program pendidikan dan pelatihan;
- 3) Penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
- 4) Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi paska pendidikan dan pelatihan;
- 6) Pengelolaan tugas belajar, izin belajar dan ikatan dinas; dan
- 7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan.

c) Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- 2) Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- 4) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.



c. Bidang Mutasi

Bidang Mutasi mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, dan membina pengadaan pegawai, status kepegawaian, penempatan pegawai, dan kepangkatan pegawai.

Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Mutasi;
2. Perumusan kebijakan teknis pengadaan, penempatan, kepangkatan, dan status kepegawaian;
3. Pelaksanaan pengadaan pegawai;
4. Pelaksanaan dan pembinaan status kepegawaian;
5. Pelaksanaan, pengoordinasian penempatan pegawai;
6. Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan kepangkatan pegawai;
7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Mutasi.

a) Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pengadaan pegawai dan perubahan status kepegawaian.

Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengadaan pegawai dan perubahan status kepegawaian;
- 3) Pelaksanaan pengadaan pegawai;
- 4) Pelaksanaan dan pengoordinasian perubahan status kepegawaian; dan
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian.

b) Subbidang Penempatan Pegawai

Subbidang Penempatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pegawai.

Subbidang Penempatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:



- 1) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penempatan Pegawai;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penempatan pegawai;
- 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan kepala satuan organisasi;
- 4) Pelaksanaan dan pengoordinasian penempatan pejabat fungsional umum dan pejabat fungsional tertentu; dan
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penempatan Pegawai.

c) Subbidang Kepangkatan Pegawai

Subbidang Kepangkatan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan kepangkatan pegawai. Subbidang Kepangkatan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai;
- 2) Perumusan kebijakan teknis kepangkatan pegawai;
- 3) Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kepangkatan pegawai;
- 4) Pembinaan dan pengendalian penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu; dan
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Kepangkatan Pegawai.

d. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, dan pelayanan data dan informasi pegawai.

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai, pelayanan data dan informasi pegawai;
3. Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
4. Pelayanan administrasi pegawai dan kesejahteraan pegawai;



5. Pelaksanaan dan pembinaan pelayanan data dan informasi pegawai;
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.

a) Subbidang Pembinaan Pegawai

Subbidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai

Subbidang Pembinaan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pembinaan Pegawai;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan pegawai;
- 3) Pelaksanaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
- 4) Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan penilaian kinerja pegawai; dan
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pembinaan Pegawai.

b) Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.

Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai;
- 3) Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan administrasi pegawai;
- 4) Pelaksanaan, pengoordinasian dan pembinaan pelayanan kesejahteraan pegawai; dan
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai.



c) Subbidang Data dan Informasi Pegawai

Subbidang Data dan Informasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi pegawai.

Subbidang Data dan Informasi Pegawai dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai;
- 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi pegawai;
- 3) Pelaksanaan, pengoordinasian, dan pembinaan pengelolaan data, informasi, dan dokumen pegawai;
- 4) Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan
- 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data dan Informasi Pegawai.

e. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan keahlian. Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan tupoksinya yaitu dibidang pengelolaan kepegawaian maka ruang lingkup pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Sleman adalah :

1. Penyelenggaraan pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai;
2. Penyelenggaraan pengembangan informasi kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan data, dokumentasi dan informasi pegawai;
4. Penyelenggaraan pelayanan administrasi pegawai;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penggajian pegawai;
6. Penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;



7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pembinaan pegawai;
8. Penyelenggaraan penyusunan formasi pegawai;
9. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengadaan pegawai;
10. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengembangan karier pegawai;
11. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penempatan pegawai;
12. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pemberhentian pegawai;
13. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan kepangkatan pegawai;
14. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian pengangkatan calon pegawai;
15. Penyelenggaraan, dan pengoordinasian penetapan pangkatan pegawai;
16. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengoordinasian penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan;
17. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan program pendidikan dan pelatihan;
18. Penyelenggaraan, pendidikan dan pelatihan;
19. Pengoordinasian, pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Secara umum pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan informasi kepegawaian;
2. Pelayanan administrasi pegawai;
3. Pelayanan administrasi penggajian pegawai;
4. Pelayanan pembinaan pegawai;
5. Pelayanan pengembangan karier pegawai;
6. Pelayanan pemberhentian pegawai (pensiun);
7. Pelayanan kepangkatan pegawai;
8. Pelayanan pendidikan dan pelatihan pegawai.

C. SUMBERDAYA MANUSIA

Kapasitas sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan kompetensinya dapat dilihat dari aspek kualifikasi menurut jenjang kepangkatan, tingkat pendidikan formal.



Data Pegawai Satuan Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman sampai dengan 31 Desember 2019 :

1. Data menurut golongan :

No	Golongan	Jumlah
1	IV/b	1 orang
2	IV/a	4 orang
3	III/d	13 orang
4	III/c	21 orang
5	III/b	13 orang
6	III/a	7 orang
7	II/d	1 orang
8	II/c	3 orang
9	II/b	1 orang
10	II/a	1 orang

2. Data pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	- orang
2	SLTP	- orang
3	SLTA	17 orang
4	D.III	3 orang
5	D.IV	- orang
6	S1	29 orang
7	S2	14 orang

3. Data Pejabat

No	Pejabat Struktural	Jumlah
1	Eselon II b	- orang
2	Eselon III a	1 orang
3	Eselon III b	3 orang
4	Eselon IV a	12 orang



No	Pejabat Struktural	Jumlah
5	Eselon IV b	1 orang
Pejabat Fungsional		
1	Arsiparis	1 Orang
2	Analisis Kepegawaian	9 Orang

D. KEUANGAN

Perbandingan anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2018 dan anggaran setelah perubahan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Anggaran	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Belanja tak Langsung	104.593.283.840	152.759.607.326
2	Belanja Langsung	11.520.860.462	15.447.244.900
Total Anggaran		116.114.144.302	168.206.852.226

Anggaran pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 ada beberapa perubahan, baik dari sisi pagu anggaran maupun program dan kegiatan. Beberapa perbedaan tersebut meliputi:

1. Adanya penghapusan program kegiatan yaitu Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga serta kegiatan Pembinaan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi karena tidak sesuai dengan tupoksi BKPP sehingga tidak dapat dilaksanakan;
2. Pagu anggaran BKPP tahun 2019 naik dibanding tahun 2018 yaitu sebesar Rp.48.166.323.486 pada belanja tidak langsung dan naik sebesar Rp.3.926.384.438 pada belanja langsung;
3. Adanya penyederhanaan kegiatan sehingga beberapa kegiatan pada tahun anggaran 2018 (Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS, Penyelenggaraan Forum Komunikasi Kepegawaian, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dan LP2P) dihapuskan pada tahun anggaran 2019.



Sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif ditetapkan Indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Indikator tersebut telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019. Jenis Indikator kinerja meliputi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*).

E. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menunjang kelancaran tugas dalam pengelolaan sumber daya aparatur di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan telah didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

No.	Jenis Aset Tetap	31 Desember 2019
1.	Peralatan & Mesin	4.138.156.978,01
2.	Gedung & Bangunan	4.676.225.477,00
3.	Aset Tetap Lainnya	8.435.600,00
4.	Akumulasi Penyusutan	4.348.924,646,44
Jumlah (Rp)		4.658.136.101,57



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menetapkan beberapa indikator kinerja utama sejak tahun 2018, yang diimplementasikan/dijabarkan ke dalam indikator kinerja kegiatan (*Outcome*).

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Indikator Sasaran		Target 2019	Realisasi 2019	Satuan
1.	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100	100	%
2.	Predikat LAKIP BKPP	A	AA	predikat
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	86,62	%
4.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	92	95,8	%
5.	Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	0,30	0,42	%
6.	Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	90	93,91	%
7.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	40	46,23	%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan tekat dan janji pimpinan instansi dalam melaksanakan rencana kerja yang telah disusun dimana didalamnya menjanjikan atau menetapkan sasaran, indikator kinerja, dan target/rencana capaiannya serta anggaran yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan. Perjanjian kinerja tahun 2019 sebagaimana dijelaskan dalam tabel Perjanjian Kerja.



Perjanjian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai LAKIP BKPP	A	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	4.950.000
					Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	121.403.000
			Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti.	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.346.004.200
					Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	8.255.000
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	5.380.000
					Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	284.857.300
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	25.250.000					
2	Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	86%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	3.432.750
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	677.295.000
3	Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.	92%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.232.959.700
					Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.	0.30%
			Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	90%	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	41.514.000
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	508.003.500



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
4	Meningkatnya pengembangan karier berbasis merit sistem	Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.	40%	Program Pendidikan Kedinasan	48.282.000
					Program peningkatan kapasitas aparatur daerah	8.310.838.500
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.671.990.200

Dalam perjanjian kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Perjanjian kinerja sendiri merupakan alat yang bermanfaat untuk mengukur apakah program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan serta untuk mengukur seberapa besar pencapaian target-target yang telah ditetapkan.

Total anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk tahun anggaran 2019 adalah Rp. 168.206.852.226 yang dipaparkan dalam bab III dan detil realisasi dan penggunaan dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan variabel indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). Berikut tabel Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja selama tahun 2019 yang telah disajikan secara online melalui **SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)** melalui situs <http://sso.slemankab.go.id>. Berikut realisasi kinerja utama BKPP per triwulan :

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi					Capaian Kinerja %
				Triwulan					
				1	2	3	4	Tahunan	
Meningkatkan tatakelola Pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai LAKIP BKPP	A	0	0	AA	AA	AA	116,24
		Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti.	100	0	0	0	100	100	100
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	86	0	86,98	86,98	86,25	86,62	100,72



Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi					Capaian Kinerja %
				Triwulan				Tahunan	
				1	2	3	4		
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.	92	97.97	97.94	98.08	95.8	95,8	104.13
		Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.	0.3	0.24	0.05	0.21	0.42	0,42	140
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	90	93.25	93.59	93.70	93.91	93,91	104.34
	Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.	40	6.72	15.13	32.77	46.23	46,23	115.57

Dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kabupaten Sleman disajikan capaian realisasi selama per triwulan untuk ke – 7 indikator kinerja Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman dalam rangka mencapai sasaran strategis tahun 2016 - 2021.

Untuk beberapa indikator tidak terdapat capaian per triwulan karena antara lain (1) indikator – indikator tersebut tidak didesain untuk terealisasi dalam hitungan triwulan akan tetapi merupakan target tahunan. (2) indikator tersebut merupakan realisasi dari kegiatan atau sub kegiatan yang baru direncanakan baru dilaksanakan pada akhir tahun (triwulan IV) untuk penyelesaiannya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2019.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk indikator “persentase pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- >95 s.d 100 = Sangat Berhasil
- >80 s.d 95 = Berhasil
- >50 s.d 80 = Cukup Berhasil
- <50 = Kurang Berhasil

Untuk capaian diatas 100% mendapat predikat Sangat Berhasil dan capaian dibawah 0% masuk kedalam angka 0%.

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan memiliki 4 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan tugasannya, ke-enam sasaran tersebut didukung oleh 7 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

No	Sasaran RPJM	Jumlah indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	2	108.12%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	1	100.72%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai	3	116.14%	Sangat Berhasil



No	Sasaran RPJM	Jumlah indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Predikat
4.	Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	1	115.57%	Sangat Berhasil

Pengukuran dan analisis capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja akan ditampilkan dalam tabel-tabel berikut ini :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian Kinerja 2019
1.	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%
2.	Predikat LAKIP BKPP	A	AA	116.24%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	86.62	100.72%
4.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	92%	95.8	104.13%
5.	Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	0.3%	0.42	140%
6.	Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	90%	93.91	104.34%
7.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	40%	46.23	115.57%

2. Perbandingan Realisasi Tahun 2019 dengan Tahun 2018

No	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Target 2019	Realisasi	
				2018	2019
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100,00%	100%
		Predikat LAKIP BKPP	A	AA	AA
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	80.27%	86.62%
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	92%	97.97%	95.8%
		Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	0.3%	0.34%	0.42%
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	90%	93.61%	93.91%
4.	Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	40%	70.59%	46.23%



3. Realisasi Kinerja Tahun 2019 dibanding Target Kinerja 2021

No	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran	Realisasi 2019	Target 2021
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Predikat LAKIP BKPP	AA	A
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.62%	90
3.	Meningkatnya kualitas perencanaan & pengembangan karier pegawai.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	95.8%	94
		Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	0.42%	0,30
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	93.91%	94
4.	Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	46.23%	42

Analisis Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019, terdapat kegiatan-kegiatan yang pelaksanaannya masih belum optimal. Berikut adalah faktor pendorong keberhasilan, penghambat, dan upaya penyelesaian masalah :

Faktor Pendorong Keberhasilan

1. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM;
2. Pelayanan Kepegawaian yang memadai dengan dukungan SDM serta TI;
3. Koordinasi hubungan kerja yang sinergis;
4. Pelayanan kepegawaian berbasis pada kepuasan pelanggan;
5. Adanya komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi dalam peningkatan SDM;
6. Adanya komitmen dari PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan pasca sarjana;
7. Tersedianya SDM yang cukup memadai;
8. Pengelolaan Administrasi berbasis Teknologi Informasi;
9. Perkembangan Teknologi Informasi dalam mendukung program kepegawaian.



Faktor Penghambat

1. Perkembangan peraturan kepegawaian yang dinamis;
2. Terbatasnya SDM pelayanan kepegawaian;
3. Belum tersedianya uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan;
4. Keterbatasan SDM dalam penyusunan SKJ;
5. Ketentuan perundang-undangan yang membatasi kewenangan Bupati petahana selaku pejabat pembina kepegawaian;
6. Minimnya alokasi formasi untuk CPNS baru dari pelamar umum;
7. Alokasi anggaran untuk peningkatan jenjang pendidikan ke pasca sarjana masih kurang.

Upaya Penyelesaian Masalah

1. Meningkatkan koordinasi dengan dinas pengampu sistem perencanaan, pelaporan kinerja, dan evaluasi serta pelaporan keuangan yang terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi Kementrian dan Lembaga terkait peraturan kepegawaian;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan kepegawaian dengan pemanfaatan IT untuk kepuasan pelanggan;
4. Menyusun uraian tugas tiap-tiap pemangku jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
5. Meningkatkan kemampuan SDM dalam penyusunan SKJ;
6. Melaksanakan anjab mandiri dengan bekerjasama dengan instansi terkait;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan ijin belajar dan tugas belajar;
8. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pemberi beasiswa;
9. Mengatasi belum Optimalnya pemanfaatan Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan lembaga pengembangan SDM;
10. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk mengoptimalkan TI dalam pengelolaan kepegawaian SKPD;
11. Penyelenggaraan diklat serta adanya penawaran jenis diklat yang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya;
12. Adanya stimulan biaya diklat yang ditawarkan oleh penyelenggara diklat yang berdampak pada lebih efisiennya penggunaan biaya diklat;



13. Komitmen yang kuat dalam lingkup organisasi SKPD untuk peningkatan kapasitas pegawai;
14. Mempertajam metode Analisa Kebutuhan Diklat (AKD) sehingga rumusan kebutuhan diklat yang dihasilkan benar-benar dapat dilaksanakan dan sesuai kebutuhan;
15. Meningkatkan dan menjaga komunikasi & koordinasi dan kerja sama dengan lembaga penyelenggara diklat;
16. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran diklat sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak usulan diklat.

Realisasi Sasaran 1 :

“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah dengan indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti adalah 100% dengan target kinerja sebesar 100% dan target Predikat LAKIP BKPP adalah A atau sebesar 4 poin dengan realisasi sebesar 5 poin atau predikat AA.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%
2	Predikat LAKIP BKPP	5	4	5	116.24%

Indikator Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti diukur dari Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100%. Sedangkan Predikat LAKIP BKPP dari Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah, untuk hasil penilaian tahun 2019, ada 5 (lima) komponen penilaian, yaitu 1).Perencanaan Kinerja (30 dari nilai maksimal 30) ; 2). Pengukuran Kinerja (22,5 dari nilai maksimal 25); 3). Pelaporan Kinerja (15 dari nilai maksimal 15); 4). Evaluasi Kinerja (10 dari nilai maksimal 10) dan 5). Capaian Kinerja (16,41 dari nilai maksimal 20).

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung (1). Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD (2) Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar



realisasi kinerja SKPD (3) Kegiatan Penyusunan perencanaan kerja SKPD (4) Kegiatan Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan SKPD (5) Kegiatan Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan, (6) Kegiatan Penatausahaan keuangan dan aset SKPD.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi			
						Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai LAKIP BKPP	A	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	4.950.000	4.630.000	93,54	100,00	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.403.000	117.852.500	97,08	100,00	
Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti.	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.595.000	86.595.000	100,00	100,00	
				Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	902.502.200	840.823.359	93,17	100,00	
				Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	356.907.000	351.864.410	98,59	100,00	
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	8.255.000	7.931.000	96,08	100,00
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Program Pengelolaan Dokumen SKPD	5.380.000	5.380.000	100,00
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelai	284.857.300	259.872.852	91,23	100,00
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	25.250.000	21.540.000	85,31	100,00

**Realisasi Sasaran 2 :**

“Meningkatnya kualitas pelayanan publik.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebesar 86.62% dengan target kinerja sebesar 86%.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80.27%	86%	86.62%	100.72%

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat diukur dari Indeks kepuasan pengguna website, pada tahun 2018 capaian survey kepuasan pelanggan adalah sebesar 80.27% Sedangkan untuk realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2019 adalah sebesar 86.62% dengan capaian kinerja sebesar 100.72%. Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
						Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah	3.432.750	3.432.750	100,00	100,00
			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI	677.295.000	658.588.500	97,24	100,00

Realisasi Sasaran 3 :

“Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai dengan indikator (1). Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi (2). Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 (3). Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	97.97%	92%	95.8%	100,00%
2.	Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	0.34%	0.3%	0.42%	116.24%
3	Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	93.61%	90%	93.91%	100.72%

Indikator Persentase Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi diukur dari Jumlah jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural, pada tahun 2019 telah terealisasi sebesar 95.8% dengan capaian kinerja sebesar 100,00%.

Indikator Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2 diukur dari Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1, pada tahun 2019 telah terealisasi sebesar 0.42% dengan capaian kinerja sebesar 116.24%.

Indikator Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian diukur dari Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai, pada tahun 2019 telah terealisasi sebesar 93.91% dengan capaian kinerja sebesar 100.72%. Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
						Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.	92	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan calon PNS	828.630.700	442.266.500	53,37	90,00
				Penempatan PNS	141.073.000	120.972.908	85,75	100,00
				Pengelolaan kenaikan pangkat dan sistem administrasi pelayanan kepegawaian SAPK	113.725.500	106.453.152	93,61	99,00



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
						Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
				Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	473.824.000	455.601.000	96,15	100,00
				Pemberhentian PNS (pensiun)	675.706.500	662.804.450	98,09	100,00
	Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.	0,30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	156.829.750	135.081.539	86,13	100,00
	Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	90	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman	41.514.000	38.969.000	93,87	100,00
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	16.829.250	16.704.250	99,26	100,00
				Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai	310.332.750	300.878.000	55,58	100,00
				Pengembangan pelayanan Kepegawaian	180.841.500	172.482.750	95,38	98,00

Realisasi Sasaran 4 :

“Meningkatkan kualitas diklat pegawai.”

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas diklat pegawai dengan indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi 2019		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	70,59.%	40%	46.23%	115.57%



Indikator Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan diukur dari Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat, pada tahun 2019 tercapai realisasi kinerja sebesar 46,23% dari target kinerja 115.57%.

Sasaran tersebut dicapai dari kegiatan pendukung :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		
						Anggaran (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.	40%	Program Pendidikan Kedinasan	Pengembangan diklat	48.282.000	43.237.000	89,55	100,00
			Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	5.804.712.000	5.527.751.700	95,23	100,00
				Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS	2.506.126.500	2.424.055.747	96,73	100,00
			Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	1.424.589.000	1.288.440.800	90,44	100,00
				Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	188.751.200	181.027.600	95,91	100,00
				Pengendalian Tenaga Non PNS	58.650.000	57.870.000	98,67	100,00

Capaian kinerja diukur dengan cara menghitung capaian hasil sesuai definisi operasional yang telah dirumuskan dengan mengacu pada capaian kegiatan pendukungnya. Adapun untuk evaluasi capaian kinerjanya dilakukan dengan membandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya disertai analisa faktor-faktor yang mempengaruhinya.



Capaian Sasaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	RKT	Target	Realisasi	%	Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai LAKIP BKPP	skor	85	A	AA	116,24	108.12	Sangat Berhasil
		Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	84	86	86,62	100,72	100.72	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	%	91	92	95,8	104,13	116.14	Sangat Berhasil
		Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	%	0.30	0.30	0.42	140		
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	%	88	90	93,91	104,34		
4	Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.	%	39	40	46,23	115,57	115.57	Sangat Berhasil

Dari keempat sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2019 bisa dilihat bahwa keempatnya memiliki capaian kinerja di atas 95% sehingga Predikat Kinerja yang dicapai adalah Sangat Berhasil.

Analisis Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya. Berikut ikhtisar tingkat efisiensi penggunaan Sumber Daya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan membandingkan antara target dan realisasi (1) indikator sasaran, (2) anggaran, dan (3) realisasi fisik :



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
							Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Nilai LAKIP BKPP	A	AA	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi	4.950.000	4.630.000	93,54	100
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.403.000	117.852.500	97,08	100
Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti.	100%	100%	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa administrasi keuangan	86.595.000	86.595.000	100	100
					Penunjang pelayanan administrasi perkantoran	902.502.200	840.823.359	93,17	100
					Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan kantor	356.907.000	351.864.410	98,59	100
				Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD	8.255.000	7.931.000	96,08	100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
							Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
				Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/ arsip daerah	Pengelolaan Dokumen SKPD	5.380.000	5.380.000	100	100
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair	284.857.300	259.872.852	91,23	100
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai	25.250.000	21.540.000	85,31	100
Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat.	86%	86,62%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah	3.432.750	3.432.750	100	100
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pemberdayaan Dewan Pengurus dan Anggota KORPRI	677.295.000	658.588.500	97,24	100
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi.	92%	95,8%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan calon PNS	828.630.700	442.266.500	53,37	90
					Penempatan PNS	141.073.000	120.972.908	85,75	100



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
							Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
					Pengelolaan kenaikan pangkat dan sistem administrasi pelayanan kepegawaian SAPK	113.725.500	106.453.152	93,61	99
					Penyusunan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	473.824.000	455.601.000	96,15	100
					Pemberhentian PNS (pensiun)	675.706.500	662.804.450	98,09	100
	Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2.	0.30%	0.42%	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	156.829.750	135.081.539	86,13	100
	Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian.	90%	93,91%	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Pengelolaan dokumen kepegawaian Pemkab Sleman	41.514.000	38.969.000	93,87	100
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur				Pembangunan /Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	16.829.250	16.704.250	99,26	100	
				Pembinaan dan Peningkatan Kinerja Pegawai	310.332.750	300.878.000	96,95	100	



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		
							Keu (Rp)	Keu (%)	Fisik (%)
					Pengembangan pelayanan Kepegawaian	180.841.500	172.482.750	95,38	98
Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan.	40%	46,23%	Program Pendidikan Kedinasan	Pengembangan diklat	48.282.000	43.237.000	89,55	100
				Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	5.804.712.000	5.527.751.700	95,23	100
					Pendidikan dan pelatihan struktural, teknis, dan fungsional bagi PNS	2.506.126.500	2.424.055.747	96,73	100
				Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	1.424.589.000	1.288.440.800	90,44	100
					Penyelenggaraan diklat teknis, fungsional dan kepemimpinan	188.751.200	181.027.600	95,91	100
					Pengendalian Tenaga Non PNS	58.650.000	57.870.000	98,67	100

Indikator sasaran telah tercapai dengan rata – rata capaian kinerja di atas 100% dengan capaian tertinggi pada indikator Persentase Nilai LAKIP BKPP yaitu 116.24% dan paling rendah Persentase hasil temuan yang ditindaklanjuti yaitu 100%.



Capaian indikator sasaran tersebut didukung realisasi anggaran belanja langsung sebesar 93,54%, dalam realisasi tersebut, serapan anggaran terendah adalah pada kegiatan Seleksi Penerimaan calon PNS dengan serapan anggaran sebesar 53,37% dengan realisasi fisik 90,00%. Hal ini dikarenakan adanya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 205-4/99 tanggal 9 Desember 2019 perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019, dimana pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 hanya pada tahap seleksi administrasi sedangkan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang dilaksanakan pada awal tahun 2020,

Secara keseluruhan dari total anggaran Belanja Langsung Rp.15.447.244.900,00 terealisasi sebesar Rp.14.333.106.767,00, sehingga tercapai capaian keuangan sebesar 92,79% dan capaian fisik sebesar 99,52%

B. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan Akuntansi

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman menggunakan sistem pelaporan yang berdasarkan pada peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah yakni

1. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prosedur akuntansi pengeluaran kas dari proses pencatatan sampai dengan pelaporan dilakukan dengan cara manual maupun menggunakan aplikasi komputer. Periode akuntansi adalah jangka waktu satu tahun anggaran, dimulai tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.



Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2019 adalah menggunakan basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan kinerja keuangan.

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Keuangan

Rincian Penjelasan

Kas Rp 0,-

Jumlah tersebut merupakan saldo kas di Bendahara Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pertanggal 31 Desember 2019.

Sisa Anggaran Rp. 29.623.075.031,-

Jumlah tersebut merupakan sisa anggaran yang belum dicairkan maupun anggaran yang sudah dicairkan. Sisa anggaran yang sudah dicairkan (UYHD) sebesar Rp. 646.465.044,- dan Sisa anggaran yang belum dicairkan sebesar Rp. 28.976.609.987,-

Sisa anggaran secara keseluruhan tsb terdiri dari:

Belanja tidak langsung	Rp. 28.508.936.898,-
Belanja langsung	Rp. 1.114.138.133,-

Realisasi Belanja

Belanja tidak langsung Rp 124.250.670.428,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Gaji dan Tunjangan PNS	Rp. 3.930.798.851,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 120.319.871.577,-
Jumlah	Rp. 124.250.670.428,-



Belanja Langsung Rp 14.333.106.767,-

Jumlah tersebut merupakan realisasi anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)
Belanja Langsung	14.333.106.767,00
Belanja Pegawai	1.832.634.400,00
Honorarium PNS	1.716.221.400,00
Honorarium Non PNS	116.413.000,00
Belanja Barang Dan Jasa	12.214.422.367,00
Belanja Bahan Pakai Habis	502.863.495,00
Belanja Bahan/Material	17.280.000,00
Belanja Jasa Kantor	1.135.976.654,00
Belanja Premi Asuransi	0,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	246.175.200,00
Belanja SewaRumah/Gedung/Gudang/ Parkir/Tanah	240.060.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	40.800.000,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	87.180.250,00
Belanja Makanan dan Minuman	1.149.816.000,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	47.030.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	871.908.549,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	106.400.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.932.965.247,00
Belanja Pemeliharaan	85.036.472,00
Belanja Perawatan dan Pengobatan	74.435.500,00
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	66.250.000,00



Uraian	Realisasi Anggaran (Rp)
Belanja Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/ Akademisi	610.245.000,00
Belanja Modal	286.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	16.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	10.049.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer	140.400.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	83.054.000,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	699.000,00
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruang Rumah Tangga	25.798.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	10.000.000,00

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 14.333.106.767,00 atau 92,79%. Hal tersebut karena :

- a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan keuangannya;
- b. Adanya perubahan sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan;
- c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan harga antara standarisasi barang dan jasa dengan harga pasar yang berlaku.

Analisa Efisiensi Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Penghambat	Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keu %	Fisk (%)		
1	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	86.595.000	86.595.000	100	100	-	-
2	Penyediaan Jasa Keamanan Dan Kebersihan	356.907.000	351.864.410	98,59	100	-	-



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Penghambat	Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keu %	Fisk (%)		
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung, Kendaraan, Peralatan, Mesin Dan Meubelair	284.857.300	259.872.852	91,23	100	-	-
4	Pengelolaan Kepegawaian Dan Peningkatan Kapasitas Pegawai	25.250.000	21.540.000	85,31	100	Biaya Bimtek Lebih Rendah Dari Yang Dianggarkan	Untuk Lebih Cermat Dalam Menyusun Anggaran Bimtek Pada Tahun Yang Akan Datang
5	Pengembangan Diklat	48.282.000	43.237.000	89,55	100	Pemberian Honorarium Narasumber Penyusunan Kurikulum Diklat Dan Uang Transport Peserta Presentasi Alumni Diklat Serta Perjalanan Dinas Lebih Rendah Dari Yang Dianggarkan	Agar Lebih Cermat Dalam Perencanaan Yang Akan Datang
6	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	1.424.589.000	1.288.440.800	90,44	100	Karena Menunggu Surat Dari Gubernur Diy Maka Akhirnya Terjadi Perubahan Agenda Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jpt Pratama Sekretaris Daerah Dimana Sebagian Harus Dilaksanakan Pada Tahun 2020 dan	Agar Koordinasi Lebih Intensif Dengan Perangkat Daerah Terkait Untuk Perencanaan Yang Akan Datang



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Penghambat	Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keu %	Fisk (%)		
						Pada Akhirnya Pansel Memutuskan Penundaan Tahapan Seleksi Karena Menunggu Proses Penataan Pejabat Tinggi Pratama Di Provinsi DIY	
7	Seleksi Penerimaan Calon PNS	828.630.7000	442.266.500	53,37	90	Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 205-4/99 Tanggal 9 Desember 2019 Perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019, Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 Pada Tahap Seleksi Administrasi Sedangkan Untuk Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar Dan Seleksi Kompetensi Bidang Dilaksanakan Pada Awal Tahun 2020	Agar Koordinasi Lebih Intensif Dengan Instansi Terkait Untuk Perencanaan Yag Akan Datang



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Penghambat	Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keu %	Fisk (%)		
8	Penempatan PNS	141.073.000	120.972.9080	85,75	100	Adanya Se Mendagri Ri Nomor : 130/14106/Sj Tanggal 18 Desember 2019 Perihal Tindak Lanjut Penyederhanaan Birokrasi Pada Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Sebagai Tindaklanjut Dari Surat Edaran Tersebut Pemerintah Kabupaten Sleman Melakukan Penundaan Kegiatan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Bagi Jabatan Struktural Yang Berakibat Serapan Belanja Pada Rekening Yang Berhubungan Dengan Kegiatan Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Bagi Jabatan Struktural Tidak Maksimal.	Agar Koordinasi Lebih Intensif Dengan Instansi Terkait Untuk Perencanaan Yang Akan Datang



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Penghambat	Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keu %	Fisk (%)		
9	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	16.829.250	16.704.250	99,26	100	-	-
10	Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Iktan Dinas	156.829.750	135.081.539	86,13	100	Anggaran Yang Rencana Untuk Tunjangan Penempatan Awal Dan Perjalanan Dinas Apabila Ada Peserta Tugas Belajar Yang Diterima Diluar Daerah Tidak Diberikan, Karena Peserta Tugas Belajar Tahun 2019 Semua Diterima Di UGM Yogyakarta	Untuk Perencanaan Yang Akan Datang Perlu Dilakukan Pemetaan Terkait Minat Lokasi Tubel
11	Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional Dan Kepemimpinan	188.751.200	181.027.600	95,91	100	-	-
12	Pembinaan Dan Peningkatan Kinerja Pegawai	310.332.750	300.878.000	96,95	100	-	-
13	Pengembangan Pelayanan Kepegawaian	180.841.500	172.482.750	95,38	98	-	-
14	Penyusunan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan	473.824.000	455.601.000	96,15	100	-	-



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Penghambat	Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keu %	Fisk (%)		
15	Pemberhentian PNS (Pensiun)	675.706.500	662.804.450	98,09	100	-	-
16	Pemberdayaan Dewan Pengurus Dan Anggota Korpri	677.295.000	658.588.500	97,24	100	-	-
17	Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Pemkab Sleman	41.514.000	38.969.000	93,87	100	-	-
18	Pengelolaan Dokumen Skpd	5.380.000	5.380.000	100	100	-	-
19	Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4.950.000	4.630.000	93,54	100	-	-
20	Penatausahaan Keuangan Dan Aset Skpd	8.255.000	7.931.000	96,08	100	-	-
21	Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	902.502.200	840.823.359	93,17	100	-	-
22	Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, Teknis, Dan Fungsional Bagi PNS	2.506.126.500	2.424.055.747	96,73	100	-	-
23	Pendidikan Dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	5.804.712.000	5.527.751.700	95,23	100	-	-
24	Pengendalian Tenaga Non-PNS	58.650.000	57.870.000	98,67	100	-	-



No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi			Penghambat	Tindak Lanjut
			Keuangan (Rp)	Keu %	Fisk (%)		
25	Pengelolaan Kenaikan Pangkat Dan Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Sapk	113.725.500	106.453.152	93,61	99	Output Nota Persetujuan Teknis Dan Penetapan Sk Peninjauan Masa Kerja Tidak Tercapai Karena Sampai Akhir Bulan Desember Tahun 2019 Tidak Ada PNS Yang Mengajukan Peninjauan Masa Kerja	Perencanaan Yang Akan Datang Untuk Lebih Cermat
26	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah	3.432.750	3.432.750	100	100	-	-
27	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.403.000	117.852.500	97,08	100	-	-

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2019



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman Tahun 2019 merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan Rencana Strategik, Rencana Kerja SKPD, Rencana Kerja Tahunan dan Pengukuran Kinerja Instansi, baik menggunakan Pengukuran Kinerja Sasaran (PPS) maupun Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH tahun 2019 juga dijelaskan tentang evaluasi kinerja antara lain :

1. Capaian Indikator Tujuan.
2. Capaian Indikator Kinerja Utama.
3. Capaian Kinerja Sasaran.

Capaian indikator sasaran strategis sebanyak 4 (Empat) sasaran strategis kesemuanya tercapai dengan kategori **SANGAT BERHASIL** (yaitu >95%). Demikian pula untuk capaian indikator kinerja utama (IKU), dimana dari 7 (Tujuh) indikator semua target di tahun 2019 juga tercapai **SANGAT BERHASIL**.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja lebih didominasi faktor eksternal, antara lain berupa ketentuan peraturan per Undang-undangan. Namun demikian telah pula disiapkan strategi pemecahan untuk tahun yang akan datang antara lain dengan meningkatkan kapasitas sumber daya apartur dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi.

Capaian kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.14.333.106.767,00 atau 92,79%. Capaian kinerja keuangan secara umum tersebut karena :

- a. Adanya peraturan perundangan yang baru sehingga tidak direalisasikan keuangannya.
- b. Adanya perubahan sistem dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
- c. Adanya efisiensi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJATAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Priyo Handoyo, S.H.,M.Si

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sri Purnomo

Jabatan : Bupati Sleman

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak kedua,
Bupati Sleman



(Sri Purnomo)

Sleman, Januari 2020

Pihak pertama,
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan
dan Pelatihan

(H. Priyo Handoyo, S.H.,M.Si)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN SLEMAN

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				Rumus Perhitungan
			Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan keuangan.	Nilai LAKIP BKPP	-	-	A (4)	A (4)	Hasil Penilaian LAKIP oleh Inspektorat Daerah.
		Persentase hasil temuan yang ditindak lanjuti.	-	-		100%	Jumlah temuan hasil pemeriksaan yang ditindak lanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	0%	86%	86%	86%	Indeks kepuasan Konsumen
3	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengembangan karier pegawai.	Penempatan pejabat struktural sesuai kompetensi	92%	92%	92%	92%	Jumlah pejabat struktural sesuai kompetensi (berbasis pengalaman atau pendidikan atau diklat atau hasil penilaian kompetensi) dibagi jumlah pejabat struktural.
		Persentase peningkatan jumlah PNS dengan tingkat pendidikan S2	0,10%	0,10%	0,20%	0,30%	Persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun ke-n dikurangi persentase pegawai berpendidikan pasca sarjana tahun n-1.
		Tingkat kelengkapan dalam penyajian data dan informasi kepegawaian	90%	90%	90%	90%	Jumlah data pegawai terisi dibagi jumlah seluruh data pegawai.
4	Meningkatkan kualitas diklat pegawai.	Persentase pelaksanaan diklat sesuai kebutuhan	5%	10%	20%	40%	Jumlah jenis diklat yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan jenis diklat hasil analisis kebutuhan diklat.

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	45.032.000	
2	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	35.643.000	
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	8.286.250	
5	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	10.530.000	
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.399.420.096	
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	581.048.200	
8	Program peningkatan kapasitas sumber daya	58.794.000	
9	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	77.180.250	
10	Program Pendidikan Kedinasan	48.282.000	
11	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur pemerintah daerah	7.115.445.500	
12	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	4.972.562.131	
	Total	14.352.223.427	



Bupati Sleman

Sri Purnomo

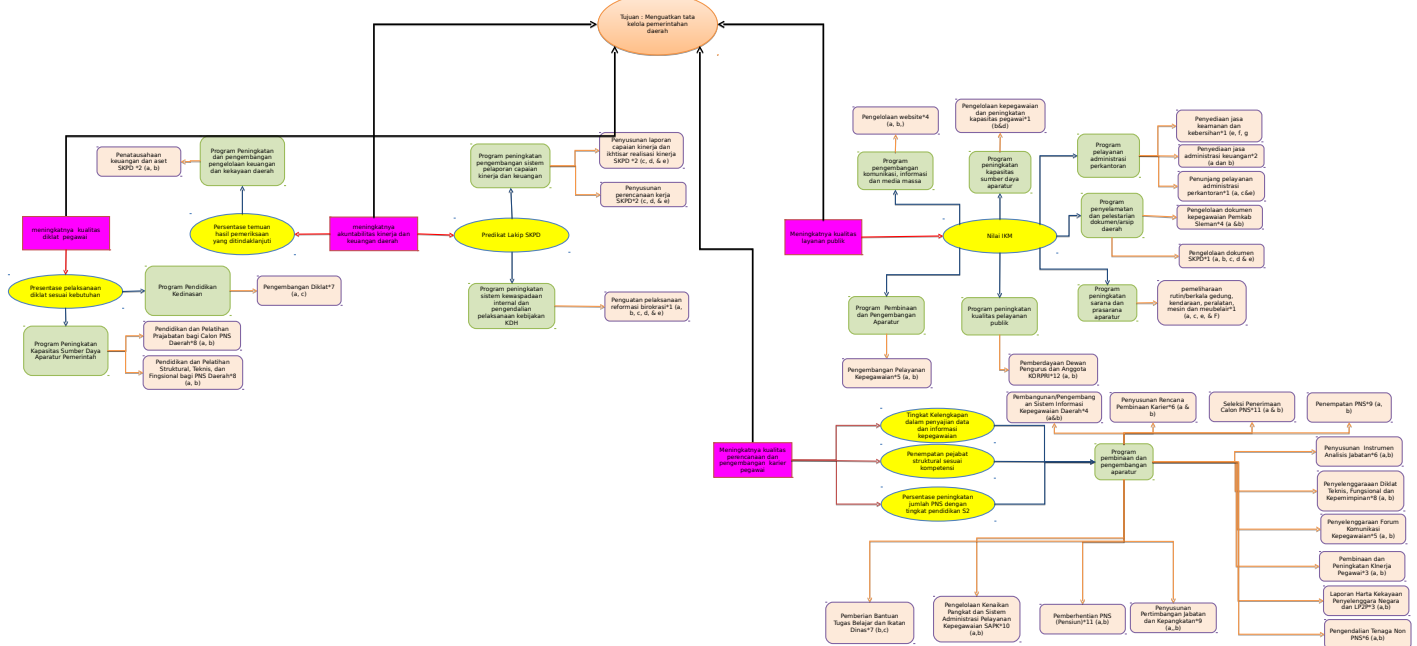
Sleman, Januari 2020
 Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

H. Priyo Handoyo, S.H., M.Si
 Pembina Utama Muda IV/c
 NIP 196301121995031002

Misi: Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Kabupaten, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan, Meningkatkan Kualitas Kelembagaan, Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Kabupaten, Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Kabupaten, Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Pemerintah Kabupaten.

Misi 1: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan pelayanan e-govt dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Sasaran: Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.



- Keterangan :
- 1. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - a. Pengadministrasian Umum
 - b. Pengadministrasian Kepegawaian
 - c. Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 - d. Pengelola Kepegawaian
 - e. Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
 - f. Pramu Kebersihan
 - g. Petugas Keamanan
 - h. Pengemudi
 - 2. Subbag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
 - a. Pengelola Keuangan
 - b. Bendahara
 - c. Pengadministrasian Perencanaan dan Program
 - d. Pengelola Bahan Perencanaan
 - e. Analisa Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3. Subbidang Pembinaan Pegawai
 - a. Pengelola Disiplin Pegawai
 - b. Analisa Pelaksanaan Disiplin
 - 4. Subbidang Data dan Informasi Pegawai
 - a. Pengadministrasian Data Penyajian dan Publikasi
 - b. Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
 - c. Pengadministrasian Kepegawaian
 - 5. Subbidang Pelayanan dan Kesejahteraan Pegawai
 - a. Analisa Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - b. Analisa Perencanaan dan Pengembangan
 - 6. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan
 - a. Analisa Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur
 - b. Analisa Pengembangan SDM Aparatur
 - 7. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Analisa Program Diklat
 - b. Pengadministrasian Tugas Belajar atau Izn Belajar
 - c. Pengadministrasian Kepegawaian
 - 8. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
 - a. Pengelola Penyelenggaraan Diklat
 - b. Analisa Diklat
 - 9. Subbidang Penempatan Pegawai
 - a. Pengadministrasian Kepegawaian
 - b. Penyusunan Rencana Mutasi
 - 10. Subbidang Keangkatan
 - a. Pengadministrasian Kepegawaian
 - b. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai
 - 11. Subbidang Pengadaan dan Status Kepegawaian
 - a. Pengadministrasian Kepegawaian
 - b. Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai
 - 12. UPT Sekretaris Dewan Pengurus KORPMI
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Pengadministrasian Umum
 - c. Pengelola Keuangan